

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

KECAMATAN JOGOROTO

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(P-RENJA)
TAHUN 2024**



**KECAMATAN JOGOROTO
KABUPATEN JOMBANG**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Memperhatikan ketentuan Pasal 346 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa perumusan rancangan perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024 yang selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan hal tersebut, maka disusunlah dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Perangkat Daerah Kecamatan Jogoroto dimana dalam proses penyusunannya didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas yang merupakan tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Jogoroto dilaksanakan untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan diformulasikan dalam Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 00.3.4.2/325/415.01/2024 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Perubahan Renja PD Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini juga berfungsi sebagai alat ukur bagi perencanaan ulang dari seluruh program kegiatan tahunan Kecamatan Jogoroto, sekaligus untuk memberikan informasi data secara makro bagi rencana kerja tahunan sehingga memudahkan dalam melaksanakan program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, efisien, ramah, inovatif dan akuntabel serta memudahkan evaluasi kinerja.

Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan akan makin mendekat pada tataran clean government dan good governance.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jogoroto Tahun 2024, didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 8/E
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 59/D, Tambahan Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 59/D);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaranpendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 114 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
19. Surat Edaran Bupati Jombang tanggal 08 Mei 2024 Nomor :100.3.4.2/325/415.01/2024 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Perubahan Renja PD Tahun 2024;
20. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang tanggal 16 Mei 2024 Nomor : 100.3.4.2/3669/415.10/2024 tentang Kebijakan Usulan Perubahan RKPD Tahun 2024

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023 Kecamatan Jogoroto adalah sebagai berikut :

- ✓ Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kecamatan Jogoroto.
- ✓ Menciptakan sinergitas antara prioritas dan sasaran pembangunan Kecamatan Jogoroto dengan Renstra Kecamatan, RKPD dan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018- 2023;
- ✓ Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Jogoroto dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang mengalami penyesuaian anggaran agar tetap dapat terlaksana dan tidak mengurangi pencapaian target yang telah ditetapkan.

b. Tujuan

Adapun tujuan dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Kecamatan Jogoroto adalah sebagai berikut:

- ✓ Sinkronisasi dan Optimalisasi pencapaian target kinerja RPJMD Tahun 2018-2023, khususnya untuk capaian target kinerja tahun 2022.
- ✓ Mewujudkan perencanaan kegiatan yang akuntabel, partisipatif dan bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
- ✓ Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan Tahun 2023

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah
- 2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Perubahan Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Perubahan renja OPD Kecamatan Jogoroto Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2024-2026, dengan Tujuan Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi dan mencapai Sasaran : 1. Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan, 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Jogoroto pada tahun 2024 melaksanakan 1 urusan pemerintahan unsur kewilayahan bidang urusan Kecamatan, yang dijabarkan dalam 6 Program, 12 kegiatan dan diimplementasikan dalam bentuk 24 Sub Kegiatan serta telah ditetapkan indikator kinerja program dan kegiatan (*outcome*) dan sub kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tabel 2.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Jogoroto Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD •

		<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Kependidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
		<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN • Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD • Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
		<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Umum Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan • Penyediaan Bahan Logistik Kantor • Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD • Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya • Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

		<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan • Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya • Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3	Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
4	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

		Pengawasan Pemerintahan Desa	
5	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
6.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa • Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2024
Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Akhir tahun pelaksanaan Renja)	
					Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)			
					K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur Formulasi: Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd dibagi jumlah pegawai kali 100%	100 persen	100 persen	100 persen	2.674.365.761	50 persen	892.516.924	100 persen	2.674.365.761
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100 persen	100 persen	100 persen	10.549.000	100 persen	1.940.800	100 persen	10.549.000
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	2 dok	2 dok	2 dok	5.929.000	2 dok	1.940.800	2 dok	5.929.000
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 dok	5 dok	5 dok	4.620.000	- dok	-	5 dok	4.620.000

	SKPD										
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengadaan pakaian dinas pegawai	100 persen	100 persen	100 persen	12.559.320	- persen	-	100 persen	12.559.320	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	17 stel	17 stel	17 stel	12.559.320	- stel	-	17 bulan	12.559.320	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100 persen	100 persen	100 persen	2.265.857.341	50 persen	827.593.593	100 persen	2.265.857.341	
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100 persen	100 persen	100 persen	637.000	100 persen	127.400	100 persen	637.000	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Jogoroto yang di fasilitasi	14 bulan	14 bulan	14 bulan	2.265.857.341	6 bulan	827.593.593	14 bulan	2.265.857.341	
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	637.000	1 dok	127.400	1 dok	637.000	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 kali	12 kali	12 kali	69.690.000	6 kali	52.607.500	12 kali	69.690.000	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	100 persen	113.925.040	50 persen	17.972.150	100 Persen	113.925.040	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	6 Paket	6 Paket	6 Paket	4.606.800	3 Paket	1.122.300	6 Paket	4.606.800	

7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	4 jenis	4 jenis	4 jenis	17.470.810	2 jenis	2.587.500	4 jenis	17.470.810
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	11 bulan	11 bulan	11 bulan	41.800.000	5 bulan	8.830.000	11 bulan	41.800.000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	2 Paket	2 Paket	2 Paket	260.000	- Paket	-	2 Paket	260.000
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	2.352.000	1 Dok	720.000	1 Dok	2.352.000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 dok	4 dok	4 dok	20.349.000	2 dok	4.666.550	4 dok	20.349.000
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	100 persen	100 persen	-	- persen	-	- persen	-
7.01.01. 2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	- gedung	- gedung	- gedung	-	- gedung	-	- gedung	-
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	8 unit	22 unit	8 unit	-	- unit	-	- unit	-
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	100 persen	81.540.000	50 persen	22.060.000	100 persen	81.540.000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 bulan	24 bulan	12 bulan	25.200.000	6 bulan	5.294.516	12 bulan	25.200.000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	56.340.000	6 jenis	16.765.565	12 jenis	56.340.000

7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 persen	200 persen	100 persen	71.451.100	50 persen	47.169.600	100 persen	71.451.100
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	9 unit	9 unit	9 unit	47.474.868	4 unit	4.805.400	9 unit	47.474.868
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayarkan pajaknya	9 unit	27 unit	9 unit	4.500.132	- unit	-	9 unit	4.500.132
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Jogoroto yang dipelihara	4 gedung	2 gedung	4 gedung	10.946.100	- gedung	-	1 gedung	10.946.100
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	8 unit	32 unit	8 unit	8.530.000	4 unit	935.000	8 unit	8.530.000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Paten Kecamatan	85 nilai	83,83 nilai	84 nilai	8.574.850	N/A nilai	N/A	85 nilai	8.574.850
7 01 02 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	8.574.850	50 persen	1.662.500	100 persen	8.574.850
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen	8.574.850	50 persen	1.662.500	100 persen	1.662.500

7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100 persen	100 persen	100 persen	N/A	N/A persen	N/A	N/A persen	N/A
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	100 persen		N/A persen		N/A persen	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeinahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	N/A dokumen	48 dokume n	N/A dokume n	N/A	N/A dokume n	N/A	N/A dokumen	N/A
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	N/A laporan	48 laporan	N/A laporan	N/A	N/A laporan	N/A	N/A laporan	N/A
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	N/A persen	100 persen	N/A persen	N/A	N/A persen	N/A	N/A persen	N/A
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	N/A lembaga	52 lembaga	N/A lembaga		N/A lembaga		N/A lembaga	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	N/A dokumen	66 dokume n	N/A dokume n	N/A	N/A dokume n	N/A	N/A dokumen	N/A
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	N/A lembaga	66 lembaga	N/A lembaga		N/A lembaga		N/A lembaga	

7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	N/A dokumen	66 dokumen	N/A dokumen	N/A						
		Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	N/A BUMDes	22 BUMDes	N/A BUMDes		N/A BUMDes		N/A BUMDes		N/A BUMDes	
		Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	N/A TP PKK	22 TP PKK	N/A TP PKK							
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	N/A persen	100 persen	N/A persen	N/A						
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	N/A laporan	24 laporan	N/A laporan	N/A						
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	N/A dokumen	24 dokumen	N/A dokumen	N/A						
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH UMUM	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	N/A persen	100 persen	N/A persen	N/A						
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	N/A persen	100 persen	N/A persen		N/A persen		N/A persen		N/A persen	

7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	N/A laporan	2 laporan	N/A laporan	N/A	N/A laporan	N/A	N/A laporan	N/A
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	N/A dokumen	4 dokumen	N/A dokumen		N/A dokumen		N/A dokumen	
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	N/A keg	2 keg	N/A keg	N/A	N/A keg	N/A	N/A keg	N/A
7 01 05 2.01 02	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam	N/A laporan	4 laporan	N/A laporan	N/A	N/A laporan	N/A	N/A laporan	N/A
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur Formulasi: Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd dibagi jumlah pegawai kali 100%	100 persen	100 persen	100 persen	2.365.704.316	50 persen	1.063.162.169	50 persen	1.063.162.169
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100 persen	100 persen	100 persen	6.265.000	50 persen	5.827.500	50 persen	5.827.500
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	3 dok	3 dok	5.390.000	2 dok	5.390.000	2 dok	5.390.000
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	5 dok	5 dok	5 dok	875.000	3 dok	437.500	3 dok	437.500

		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Jogoroto	N/A persen	N/A persen	N/A persen	-	persen		persen			
7.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	N/A paket	N/A paket	N/A paket	-	paket		paket			
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100 persen	N/A persen	100 persen	2.111.608.379	50 persen	1.347.975.308	50 persen	1.316.545.808		
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100 persen	N/A persen	100 persen		50 persen		50 persen			
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 orang/bulan	N/A orang/bulan	15 orang/bulan	1.192.621.510	15 orang/bulan	1.316.545.808	15 orang/bulan	1.316.545.808		
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	N/A laporan	1 laporan	546.000	1 laporan	31.102.500	1 laporan	31.102.500		
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	N/A dokumen	12 dokumen	66.810.000	6 dokumen	327.000	6 dokumen	327.000		
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	N/A persen	100 persen	98.240.700	50 persen	22.096.900	50 persen	22.096.900		

7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	8 paket	4.752.800	8 paket	766.300	8 paket	766.300
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 paket	21 paket	21 paket	39.490.100	21 paket	18.138.100	21 paket	18.138.100
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	39.270.000	1 paket	13.640.000	1 paket	13.640.000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	761.000	2 paket	0	2 paket	0
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.160.000	1 dokumen	860.000	1 dokumen	860.000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	4 laporan	15.120.000	3 laporan	2.070.000	3 laporan	2.070.000
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	100 persen	100 persen	110.177.320	100 persen	-	100 persen	-
7.01.01. 2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A unit	N/A unit	N/A unit	-	unit	-	unit	-
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	6 unit	6 unit	110.177.320	6 unit	-	6 unit	-

7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	100 persen	72.496.950	50 persen	27.821.727	50 persen	27.821.727
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	24 laporan	24 laporan	15.624.440	12 laporan	4.878.091	12 laporan	4.878.091
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	25 laporan	25 laporan	52.306.950	13 laporan	22.943.636	12 laporan	22.943.636
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 unit	100 unit	100 unit	127.923.060	50 unit	6.800.830	50 unit	6.800.830
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	9 unit	9 unit	10 unit	44.246.660	2 unit	6.800.830	2 unit	6.800.830
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	1 unit	1 unit	8.286.200	0 unit		0 unit	
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	8 unit	16 unit	75.390.200	3 unit	-	3 unit	-
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Paten Kecamatan	85,2 nilai	86 nilai	87 nilai	6.078.250	0 nilai	2.883.500	0 nilai	2.883.500

7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	6.078.250	100 persen	2.883.500	100 persen	2.883.500
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6.078.250	6 laporan	2.883.500	6 laporan	2.883.500
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100 persen	100 persen	100 persen	12.343.450	50 persen	4.827.500	100 persen	4.827.500
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	100 persen	8.025.000	50 persen	966.500	100 persen	8.025.000
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeinahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	22 dokumen	22 dokume n	22 dokume n	8.025.000	11 dokume n	966.500	22 dokume n	8.025.000
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 dokumen	22 dokume n	22 dokume n	8.025.000	11 dokume n	8.025.000	11 dokume n	8.025.000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100 persen	100 persen	100 persen	42.612.500	50 persen	16.245.000	100 persen	42.612.500

		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	22 lembaga	22 lembaga	22 lembaga	25.375.000	22 lembaga	15.245.000	22 lembaga	25.375.000
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	22 lembaga	22 lembaga	22 lembaga	49.842.850	22 lembaga	21.802.900	22 lembaga	21.802.900
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	17.237.500	2 laporan	1.000.000	4 laporan	17.237.500
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100 persen	N/A persen	100 persen	9.326.050	50 persen	2.475.000	50 persen	2.475.000
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	N/A kegiatan	12 kegiatan	9.326.050	6 kegiatan	2.475.000	6 kegiatan	2.475.000
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	N/A laporan	12 laporan	9.326.050	6 laporan	2.475.000	6 laporan	2.475.000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH UMUM	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100 persen	N/A persen	100 persen	18.025.000	50 persen	230.000	100 persen	18.025.000

		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	100 persen	10.500.000	50 persen	10.500.000	100 persen	18.025.000
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	N/A laporan	1 laporan	19.774.950	0 laporan	2.137.500	0 laporan	2.137.500
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	N/A dokumen	4 dokumen	42.000.000	2 dokumen	10.500.000	4 dokumen	42.000.000
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	N/A orang	100 orang	15.974.950	40 orang	230.000	100 orang	15.974.950
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	N/A dokumen	4 dokumen	42.000.000	2 dokumen	10.500.000	2 dokumen	42.000.000
						2.693.194.149		1.034.176.287,00		1.034.176.287,00

Dilihat dari Tabel 2.2, Evaluasi Triwulan II Tahun 2023, dari 23 indikator sub kegiatan terdapat 9 (Sembilan) indikator sub kegiatan yang sudah mencapai target kinerja pada tahun berjalan, yaitu indikator:

1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
2. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi
4. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
5. Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi
6. Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar
7. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina
8. Jumlah Laporan Trantibum

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang belum simetris dengan target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan karena penyesuaian target/keluaran kegiatan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

➤ **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 3 dokumen terealisasi 2 dokumen (Renja 2024 dan Renstra 2024-2026) dan 1 dokumen sisanya akan dilaksanakan pada triwulan III (Renja Perubahan 2024).

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 5 dokumen terealisasi 2 dokumen (LkjIP 2023 dan TB I 2024, TB II 2024) dan 2 dokumen sisanya akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV).

➤ **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
Pada sub kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan target 12 dokumen terealisasi 6 dokumen karena dokumen verifikasi per bulan, sehingga yang sudah dilaksanakan penatausahaannya 6 dokumen (Januari-Juni)

➤ **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd
Pada sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd dengan target 4 laporan terealisasi 2 laporan (laporan perjalanan dinas)

➤ **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pada sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target 24 laporan terealisasi 12 laporan (Januari sd. Juni meliputi listrik dan telepon)
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target 25 laporan telah terpenuhi 12 laporan dengan rincian laporan penyediaan jasa administrasi 6 laporan dan laporan penyediaan premi asuransi 6 laporan.

➤ **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Pada sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya dengan target 9 unit telah terealisasi 2 unit (1 unit pemeliharaan, 1 unit her STNK)

- b. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pada sub kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya target 3 gedung belum terealisasi karena untuk pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya akan dilaksanakan pada tribulan III dan IV
- c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pada sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan target 8 unit terealisasi 4 unit

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

➤ Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
Pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan indikator :
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan telah terpenuhi 2 laporan, 2 laporan sisa akan dilaksanakan pada tribulan III dan IV.

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

➤ Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pada sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan target 12 laporan terealisasi 6 laporan (Januari sd. Juni) dan 6 sisanya akan dilaksanakan pada tribulan III dan IV (Juli sd. Desember 2022).

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

➤ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan indikator umlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa telah terealisasi 11 laporan keuangan desa (laporan LRA tahun 2022) sisa 11 laporan adalah LPP Desa.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

➤ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan indikator Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan telah terealisasi 6 laporan keuangan setiap bulan.

6. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

➤ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Pada sub kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa belum terealisasi karena belum ada kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan.
- b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Pada sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan indikator Jumlah Dokumen Tugas Forum

Koordinasi Pimpinan di Kecamatan telah terealisasi 2 dokumen (setiap tribulan) dari target 4 dokumen

Analisis kinerja anggaran Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tribulan II adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

➤ Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Tahun 2024 dianggarkan Rp. 5.929.000 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 1.940.800 atau tercapai sebesar 32,73 %.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Tahun 2024 dianggarkan Rp. 4.620.000 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 0%.

➤ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Tahun 2024 dianggarkan Rp. 2.265.857.341 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 844.803.493 atau tercapai sebesar 39,34 %.

- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pada Tahun 2024 dianggarkan Rp. 637.000 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp 127.400 atau tercapai sebesar 20,00 %.
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan pada Tahun 2024 dianggarkan Rp. 69.690.000 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp 52.607.500 atau tercapai sebesar 75,48 %.
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya pada Tahun 2024 dianggarkan Rp. 12.559.320 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp 0 atau tercapai sebesar 00,00 %.
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor pada Tahun 2024 dianggarkan Rp. 4.606.800 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 1.122.300 atau tercapai sebesar 24,36 %.
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Tahun 2024 dianggarkan Rp. 14.486.450 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp 2.587.500 atau tercapai 17,86%
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Tahun 2024 dianggarkan Rp. 41.800.000 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp 8.830.000 atau tercapai 15,11 %.

- c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Tahun 2024 dianggarkan Rp. 1.010.800 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 45.800 atau tercapai sebesar 4,53 % hal ini karena ada kesalahan rekening belanja.
- b. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Tahun 2024 dianggarkan Rp. 2.352.000 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 720.000 atau tercapai sebesar 22,95 %.
- c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd pada Tahun 2024 dianggarkan Rp. 20.349.000 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 15.682.450 atau tercapai sebesar 77,06 %

➤ **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Tahun 2024 rencana akan di anggarkan pada PAK 2024.

➤ **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**

- 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Tahun 2024 dianggarkan Rp. 25.200.000 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 5.294.516 atau tercapai sebesar 15,49 %.
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Tahun 2024 dianggarkan Rp. 56.340.000 dan realisasi sampai dengan

Tribulan II sebesar Rp. 16.765.565 atau tercapai sebesar 29,75 %.

➤ **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Tahun 2024 dianggarkan Rp. 71.451.100 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp 5.740.400 atau tercapai sebesar 13,34 %. Kegiatan menyesuaikan Jatuh Tempo Pajak Kendaraan.
2. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada tahun 2024 dianggarkan Rp. 10.946.100 0 belum terealisasi karena pemeliharaan gedung akan dilaksanakan pada tribulan III.
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Tahun 2024 dianggarkan Rp. 8.530.000 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 935.000 atau tercapai sebesar 10,96 %.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

➤ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

a. Peningkatan efektivitas kegiatan Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan

Peningkatan efektivitas kegiatan Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Tahun 2024 dianggarkan Rp. 8.574.850 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 1.662.500 atau tercapai sebesar 11,07%.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

➤ Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a. Peningkatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa pada Tahun 2024 dianggarkan Rp. 42.612.500 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 16.245.000 atau tercapai sebesar 38,12%.

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

➤ Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Tahun 2024 dianggarkan Rp. 20.080.000 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 6.061.300 atau tercapai sebesar 23,52%.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

➤ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa pada Tahun 2024 dianggarkan Rp. 8.025.000 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 966.500 atau tercapai sebesar 12,04%.

6. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

➤ Fasilitasi, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Tahun 2024 dianggarkan Rp. 18.025.000 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 230.000 atau tercapai sebesar 0,52%.

b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan pada Tahun 2024 dianggarkan Rp. 42.000.000 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 10.500.000 atau tercapai sebesar 25,00%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kecamatan Jogoroto merupakan lembaga pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, oleh sebab itu maka peningkatan pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat Kecamatan Jogoroto, baik yang terkait dengan pelayanan administrasi persuratan, fasilitasi kegiatan sosial ekonomi, pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas adalah merupakan tugas utama.

Secara umum, dasar penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Jogoroto adalah Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat. Maksud dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk mempertegas dan memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah. Adapun tujuan dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Camat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Jogoroto menyelenggarakan 1 (satu) Urusan yaitu Urusan Kewilayahan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut :

1. Capaian Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program

Sampai dengan periode tribulan II tahun 2024, Kecamatan Jogoroto telah menganggarkan penyusunan rencana kerja sejumlah 2 dokumen (Renja 2024 dan Perubahan Renstra 2024-2026) , laporan capaian kinerja sebanyak 3 dokumen (LkjIP 2023 dan laporan

capaian kinerja tribulan 1 dan 2), dan laporan keuangan sebanyak 1 dokumen (Laporan Keuangan 2023).

2. Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya mencapai peningkatan pelayanan kecamatan yaitu terselenggaranya Musrenbang kecamatan, terlaksananya kegiatan pelayanan PATEN, dilaksanakannya kegiatan pembinaan administrasi desa oleh Tim Pembina Kecamatan, pembinaan PKK sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 bahwa analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, atau indikator-indikator lainnya yang sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Dalam hal ini Kecamatan Jogoroto menggunakan indikator yang mencerminkan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi. Evaluasi capaian kinerja pelayanan disajikan dengan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jogoroto
Kabupaten Jombang

No	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	SPM/NSPK/SDG's	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai SAKIP			70,01	72,09	73,00	74,00	70,89	72,09	73,00	74,00	
3	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	1. Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	2. Persentase laporan keuangan yang tersusun			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase realisasi pengadaan gedung kantor			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	SPM/NSPK/SDG's	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	
11	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	1. Nilai IKM Kecamatan Jogoroto			83,46	85,00	85,00	86,00	83,46	85,00	96,00	97,00	
14	2.Nilai IPP Kecamatan Jogoroto			3,00	3,5	4,00	5,00	3,00	3,5	3,30	4,5	
15	Nilai Paten Kecamatan			85,00	85,00	86,33	87,00	85,00	85,00	86,00	87,00	
16	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
18	2. Jumlah Lembaga / Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif			22 Lembaga	22 Lembaga	22 Lembaga	22 Lembaga	22 Lembaga	22 Lembaga	22 Lembaga	22 Lembaga	
19	1.Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu			22 Desa	22 Desa	22 Desa	22 Desa	22 Desa	22 Desa	22 Desa	22 Desa	

No	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	SPM/NSPK/SDG's	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	
20	2. Jumlah Lembaga . /Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina			22 Lembaga	22 Lembaga	22 Lembaga	22 Lembaga	22 Lembaga	22 Lembaga	22 Lembaga	22 Lembaga	
21	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	
22	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
26	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum.			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
27	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa			22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	
28	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti			22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	
29	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa			22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD

Tingkat Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Jogoroto dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Jogoroto, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik masih sangat minim untuk mendukung pelayanan menuju Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang kurang di Kecamatan Jogoroto adalah sarana bermain anak yang memadai, area parkir yang aman dan nyaman dan kantin pelayanan.

b. Penyusunan RKPDes tidak tepat waktu

Desa masih terlambat dalam penyusunan RKPDes, seharusnya RKPDes disusun paling lambat tanggal 30 September masih banyak Desa yang belum mengumpulkan RKPDes. Karena kurangnya koordinasi antara pihak DPMD, Kecamatan serta desa sangat mempengaruhi keterlambatan dalam penyusunan RKPDes

c. Pembinaan Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kurangnya pembinaan Desa terhadap Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Desa sehingga kurang berkembang dan tidak dapat berjalan sebagaimana fungsinya.

d. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBDes tidak tepat waktu

Desa dalam menyusun laporan Pertanggungjawaban APBDes masih terlambat seharusnya Laporan Pertanggungjawaban APBDes di susun dan

dilaporkan ke kecamatan paling lambat 3 minggu setelah berakhir tahun anggaran.

e. Kompetensi Aparatur Pelayanan Publik

Masih rendahnya kualitas dan kompetensi SDM yang ada di Kecamatan Jogoroto karena masih minimnya diklat dan bimbingan teknis yang dapat diikuti oleh pegawai

Dari deskripsi permasalahan-permasalahan berdasarkan urusan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa isu strategis kecamatan adalah “Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan”.

3. Dampaknya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan daerah adalah:

- a. Terhambatnya pemenuhan target dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RPD Kab. Jombang Tahun 2024-2026
- b. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan yang berdampak pada kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dan tingkat kesejahteraan
- c. Anggaran dana yang tertuang dalam DPA Kecamatan Jogoroto belum dapat mengakomodir seluruh kebutuhan sehingga berdampak pada pencapaian prioritas pembangunan daerah keempat yang tertuang dalam dokumen P-RKPD Kab. Jombang tahun 2024 yakni mewujudkan pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang berkualitas melalui digitalisasi proses layanan

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Tantangan :

- a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan;

- b. Jaringan Internet yang masih terkadang crowded berpengaruh pada terhambatnya proses pelayanan kepada masyarakat;
- c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan;
- d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkualitas terkait dengan peningkatan pelayanan publik;
- d. Perubahan KTP SIAK menjadi KTP-el di Kecamatan Jogoroto saat ini
- e. belum bisa maksimal dikarenakan perangkat perekaman KTP-el terkadang tidak dapat dioperasikan yakni alat perekaman sidik jari dan iris mata terkadang trouble sehingga pemohon disarankan untuk perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jombang;
- f. Pemohon KK dan KTP-el di wilayah Kecamatan Jogoroto cukup banyak, sedangkan petugas operator hanya 1 (satu) orang yang ditangani meliputi cetak KK, Pengantar KK dan e-KTP (Barcode) dan perangkat scanner hanya 1 (satu) yang bisa dioperasikan sehingga pelayanan kurang maksimal.
- g. Penerapan Aplikasi CAK NGATESO (Cetak Akta Teko Deso) , yaitu pelayanan perubahan KK, Pencetakan Akte Kelahiran dan Akte Kematian dari Desa mengalamikendala berupa : jaringan VPN yang belum stabil, dan kemampuan SDM perangkat desa pada 2 desa yang masih kurang.
- h. Pada saat Aktivasi Aplikasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) pada warga, masih belum mengetahui tentang manfaat aplikasi tsb, dan spesifikasi perangkat yang masih kurang dari standar minimal.

5. Peluang :

- a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
- b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang pemeliharaan secara berkala;
- c. Mengikutsertakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan;
- d. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan ;

e. Untuk memperkuat kapasitas dan menjaga motivasi kerja pegawai diperlukan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan, sebagai upaya merespon tuntutan eksternal untuk selalu memperbaiki kinerja serta optimalisasi dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern dan pengawasan melekat.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Jogoroto terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

6. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:
 - a. Perencanaan Pembangunan
 - Dalam Perencanaan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2025, telah dilaksanakan melalui kegiatan Musrenbangcam, tetapi masih terdapat beberapa usulan yang belum terealisasi, dikarenakan terbatasnya anggaran pada APBD Kabupaten Jombang.
 - Diperlukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dengan melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan perubahan rencana strategis tahun 2024-2025 sehingga diperlukan output yang lebih aspiratif.
 - Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir sebagai modal database dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
 - b. Keamanan dan Ketertiban

Setiap tahun OPD Kecamatan Jogoroto dalam bidang keamanan dan ketertiban melakukan penertiban, pembinaan, pemantauan sehingga wilayah Kecamatan Jogoroto dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif dan untuk meningkatkan kinerja perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung.
 - c. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Pada Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II, telah berhasil dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Jogoroto melalui 1 (satu) Program rutin dan 5 program Kecamatan

d. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Diperlukan pembinaan lebih intensif dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa agar potensi yang ada dapat lebih berkembang serta dapat bersaing di era globalisasi diantaranya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), perdagangan transnasional, serta perkembangan teknologi informasi.

Sejauh ini tingkat kinerja Kecamatan Jogoroto sampai dengan Tahun 2024 sebagaimana yang telah ditargetkan dapat direalisasikan dengan baik.

2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun OPD Kabupaten.

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Kecamatan Jogoroto sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Rancangan rencana kerja Kecamatan Jogoroto didiskusikan dalam pembahasan Forum SKPD tingkat Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan.

Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat telah diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jogoroto dengan mempertimbangkan aspek-aspek kajian kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan jumlah anggaran, serta tantangan yang dihadapi dan peluang yang dapat dioptimalkan.

Dari proses penyelarasan beberapa isu penting yang diekspose dalam dokumen ini dengan usulan program dan kegiatan masyarakat, telah dituangkan beberapa kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 yang berkaitan dengan :

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana strategis yang bersifat aspiratif, maka akan diadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam penyusunan Renstra.
- b. Pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan adalah meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program di seluruh Desa.
- c. Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir sebagai bahan dalam penyusunan monografi kecamatan, dengan mengoptimalkan peran perangkat desa yang dinamis sebagai petugas *collecting data*,
- d. Pemerataan pembangunan fisik untuk mereduksi ketimpangan perkembangan pembangunan antar wilayah sekaligus memberdayakan sumber daya lokal melalui kegiatan padat karya.

Secara umum, usulan program dan kegiatan masyarakat telah selaras dengan kebutuhan sebagaimana telah direncanakan oleh Kecamatan Jogoroto sehingga kondisi sinergis ini dapat dengan lancar dituangkan dalam dokumen perencanaan dan diharapkan dapat berhasil dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pemilahan dan pembahasan pada Forum SKPD dan berpedoman pada Perubahan RKPD Kab. Jombang Tahun 2023,

maka ditetapkan Perubahan Renja Kecamatan Jogoroto Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PERUBAHAN RENJA KECAMATAN JOGOROTO
TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kerangka Pendanaan Tahun 2024
1	2	3	4	5
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	2.796.089.661,00
7.01.01.2.01	1. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	10.549.000
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	10.825.000,00
7.01.01.2.01.06	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 laporam	4.620.000
7.01.01.2.02	2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	2.336.184.341
		2. Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang/bulan	2.367.043.873,00
7.01.01.2.02.03	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	69.690.000,00
7.01.01.2.02.05	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3.905.000,00
7.01.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Jogoroto	100 %	12.559.320,00

7.01.01.2.05.0002	Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut keengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	19 Stel	12.559.320,00
7.01.01.2.06	3. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	88.806.400,00
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 paket	17.470.810,00
7.01.01.2.06.02	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	41.800.000,00
7.01.01.2.06.04	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 paket	2.227.790,00
7.01.01.2.06.05	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.352.000,00
7.01.01.2.06.06	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	20.349.000,00
7.01.01.2.06.09	6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	4.606.800,00

7.01.01.2.08	4.Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	93.972.363,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	40.124.868,00
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	53.847.500,00
7.01.01.2.07	5.Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	81.540.000,00
7.01.01.2.07.09	Sub Kegiatan: 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	25.200.000,00
7.01.01.2.07.10	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	36.900.000,00
7.01.01.2.09	6. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik.	100%	71.451.100,00
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	43.337.350,00
7.01.01.2.09.09	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	19.763.100,00
7.01.01.2.09.10	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 unit	11.820.000,00
7.01.02	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	81,00	8.574.850,00
7.01.02.2.02	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	8.574.850,00
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	8.574.850,00

7.01.05	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	73.475.000,00
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
7.01.05.2.01	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/PHBA	4 laporan	60.025.000,00
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	25.475.000,00
7.01.05.2.01.03	Sub Kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	60.025.000,00
7.01.05.2.01.08	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	25.475.000,00
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	51.125.000,00
7.01.03.2.01	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	22 lembaga	51.125.000,00
		Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	11 Desa	
7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan : 1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	20.437.500,00
7.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan : 2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	22 lembaga	30.687.500,00
7.01.04	Program : Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait	100%	19.505.000,00
7.01.04.2.02	Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	19.505.000,00

7.01.04.2.02.01	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	19.505.000,00
7.01.06	Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	7.425.000,00
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	
7.01.06.2.01	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	28 dokumen	7.425.000,00
7.01.06.2.01.03	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28 dokumen	7.425.000,00
				2.954.994.511,00

BAB III

PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional, Propinsi dan Kabupaten

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan RKPD juga harus memperhatikan 5 (lima) arahan utama strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita Kedua dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia 2045 Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur serta Visi Misi Presiden terpilih, yakni mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan yang menjadi prioritas (Prioritas Nasional/PN) dengan sasaran sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, mahu dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam Kebudayaan

Untuk mewujudkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

RKP Tahun 2024 bertema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, yang dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional meliputi:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, HAM dan transformasi pelayanan publik

Arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 yaitu :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
4. Penguatan daya saing
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)
8. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Kebijakan pembangunan pada skala regional yang direncanakan oleh Provinsi Jawa Timur sebagaimana RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, mengambil tema “Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Mendukung Daya Saing Daerah dalam Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agrobisnis.”.

Untuk mewujudkan tema tersebut maka ditetapkan prioritas pembangunan tahun 2024 adalah:

1. Pendidikan Berkualitas
2. Peningkatan layanan Kesehatan
3. Percepatan penurunan kemiskinan
4. Penurunan stunting dan penyakit lainnya
5. Percepatan pembangunan infrastruktur
6. Pengendalian inflasi
7. Peningkatan investasi
8. Peningkatan nilai tambah sumber daya alam
9. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang jujur, adil, damai dan bermartabat.

3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Jombang, dan Kecamatan Jogoroto melaksanakan 1 (satu) Urusan yaitu Kewilayahan, maka program kegiatan di Kecamatan Jogoroto mendukung Prioritas Pembangunan Daerah yang ke-1, yakni: **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik dengan indikator Indeks Good Governance (IGG) dengan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi.**

Guna mendukung Prioritas Pembangunan Daerah tersebut maka dalam menjalankan tugasnya ditetapkan tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja OPD, dimana tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Jogoroto adalah : **“Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi”** dengan indikator **1. Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan, 2. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten**

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran kinerja yang telah direncanakan disusun indikator kinerja dan formulasi perhitungannya. Maka Sasaran Kinerja Kecamatan Jogoroto **adalah “1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan “ dan “2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik” dengan indikator sasaran : 1) Nilai Evaluasi AKIP Kec. Jogoroto,**

Perhitungan Sasaran menggunakan formulasi tersebut adalah sebagaiberikut:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, dan Program Renstra Kecamatan Jogoroto Tahun 2024-2026

TUJUAN			SASARAN			ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
URAIAN	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI			
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan	65	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai Evaluasi AKIP tahun n	1. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan prima 2. Meningkatkan jangkauan informasi dan potensi informasi prosedur pelayanan yang diterima masyarakat	1. Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dibidang IPTEK dan IMTAQ 2. Optimalisasi Penyajian data dan informasi	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten	65	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	IKM Kecamatan Jogoroto	IKM Kecamatan Jogoroto tahun n	Meningkatkan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan perijinan dan non perijinan	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
				IPP Kecamatan Jogoroto	IPP Kecamatan Jogoroto tahun n	Meningkatkan kegiatan		Pengembangan

					seni,budaya, keagamaan, dan wawasan kebangsaan di masyarakat	Kegiatan seni, budaya,dan keagamaan yang berorientasi pada wawasan kebangsaan	Urusan Pemerintahan Umum
				Persentase laporan pelanggaran Perda / Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait $\frac{\text{Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait}}{\text{Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait}} \times 100\%$	1. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban di lingkungan Kecamatan 2. Meningkatkan pembinaan kerukunan bermasyarakat	Sosialisasi dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu $\frac{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes}} \times 100\%$	Pengembangan produk Lokal masyarakat Sesuai potensi Kecamatan	Pengembangan potensi Kecamatan berbasis produk unggulan di tiap Desa (One Village One Product)	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
				Persentase evaluasi RAPERDES APBDes /Perubahan APBDes tepat waktu	Optimalisasi partisipasi Masyarakat dalam Proses perencanaan	Perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan yang partisipatif	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

				APBDesa tepat waktu	- -----x 100% Jumlah evaluasi Raperdes APBDes / Perubahan APBDes	dan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan		
--	--	--	--	------------------------	---	--	--	--

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan

Secara umum tidak terdapat perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan di Tahun 2023, akan tetapi sebagai bagian dari upaya Kecamatan Jogoroto dalam mencapai target kinerja jangka menengah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM, pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, pendayagunaan potensi ekonomi daerah khususnya yang berbasis agribisnis, serta hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II dilaksanakan perubahan sub kegiatan, indikator dan target pada beberapa sub kegiatan.

Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Renja 2023, adalah:

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2024

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024		Bertambah/(Berkurang)		Catatan			
					Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)		K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)				
					K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)						K	Rp. (.000)	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13=(11-7)	14			
	Unsur Wilayah															
	Kecamatan															
7	01	01		Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	n/a	100%	2.674.365.761,00	50%	892.516.924	100%	2.796.089.661,00	-	246.000,00	Anggaran bertambah untuk
7	01	01	2,01	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	n/a	100%	10.549.000,00	50%	1.940.800	32,73%	10.549.000,00	-	-	Target Kinerja Tetap dan Anggaran Tetap

7	01	01	2.01.01	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	n/a	3 dokumen	5.929.000,00	2 dokumen	5.390,00	3 dokumen	5.929.000,00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	01	2.01.06	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	n/a	5 laporan	4.620.000,00	3 laporan	437,50	5 laporan	4.620.000,00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran tetap
7	01	01	2.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Pencairan Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu	100%	n/a	100%	2.207.358.088,00	50%	844.803.493	100%	2.336.184.341,00	-	-	Target Kinerja tetap dan Anggaran Bertambah
					2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	n/a	100%		100%		100%		-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	01	2.02.01	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 orang/bulan	n/a	15 orang/bulan	2.084,908,379	15 orang/bulan	499.341.740	15 orang/bulan	2,111,608,379	-	-	Target Kinerja Tetap Anggaran Bertambah
7	01	01	2.02.03	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	n/a	12 dokumen	69.690.000,00	6 dokumen	16.402.500	12 dokumen	69.690.000,00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap

7	01	01	2.02.05	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	n/a	1 laporan	637.000,00	1 laporan	127.400	1 laporan	3.905.000,00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	01	2.05	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Jogoroto	100 %	Persen	100%	0	0	0	100 %	12.559.320,00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	01	2.05.02	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	19 Stel	n/a	19 stel	0	0	0	19 stel	12.559.320,00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	01	2.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	n/a	90.566.400,00	88.806.400,00	50%	17.972.150	100 %	88.806.400,00	-	(3.418.400)	Pengurangan anggaran penyediaan bahan logistik
7	01	01	2.06.02	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 paket	n/a	21 paket	17.470.810,00	21 paket	2.237.500	21 paket	22.558.450,00	-	2.162.800	Target Kinerja tetap dan Anggaran Bertambah
7	01	01	2.06.04	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	n/a	1 paket	43.560.000,00	1 paket	8.830.000	1 paket	41.800.000,00	-	0	Anggaran belanja mamin harian pegawai disesuaikan dengan jumlah ASN sejumlah 13 orang

7	01	01	2.06.05	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	n/a	2 paket	2.227.790,00	2 paket	45.800	2 paket	1.805.600,00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	01	2.06.06	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	n/a	1 dokumen	2.352.000,00	1 dokumen	720.000	1 dokumen	2.352.000,00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	01	2.06.09	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	n/a	4 laporan	20.349.000,00	3 laporan	-	4 laporan	21.749.000,00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	01	2.06.01	6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	n/a	8 paket	4.606.800,00	3 paket	1.122.300	8 paket	6.188.600,00	-	-	Ada Kenaikan Anggaran Guna Support Kegiatan Pemilu
7	01	01	2.07	Kegiatan: Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	n/a	100%	73.275.600,00	50%	22.060.081	30.10%	73.275.600,00	-	55.334,60	Penambahan anggaran untuk pembangunan parkir dan pengadaan sarana dan prasarana
7	01	01	2.07.09	Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	n/a	1 Unit	-	0 unit	-		40.124.868,00		40.124.868,00	Pembangunan parkir kendaraan

7	01	01	2.07.10	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Jenis	n/a	6 Jenis	73.275.600,00	6 unit	-	0 Jenis	53.847.500,00	6 Jenis	55.334,60	Pengadaan Printer 3 unit Rp. 11.250.000, 2unit laptop core Rp.24.000.000, Alat Peraga Edukatif BKB Kit Rp. 18.000.000, Mesin Pemotong Rumput Rp. 2.084.600
7	01	01	2.08	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	n/a	100%	81.540.000,00	27,05%	22.060.081	100%	81.540.000,00	-	(4.500,00)	Pengurangan anggaran premi asuransi BPJS menyesuaikan dengan kebutuhan
7	01	01	2.08.02	Sub Kegiatan: 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	n/a	24 laporan	25.200.000,00	12 laporan	5.294.516	24 laporan	25.200.000,00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	01	2.08.04	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	n/a	12 laporan	56.340.000,00	13 Laporan	16.765.565	12 laporan	36.900.000,00	-	(4.500,00)	Pengurangan anggaran premi asuransi BPJS menyesuaikan

																aikan dengan kebutuhan
7	01	01	2.09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	n/a	100%	71.451.100,00	50%	5.740.400	100%	71.451.100,00	-	210.000,00	Pemeliharaan dan perluasan area kantor
7	01	01	2.09.02	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	10 unit	n/a	10 unit	51.975.000,00	2 unit	4.805.400	10 unit	43.337.350,00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	01	2.09.09	2. Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	n/a	1 unit	10.946.100,00	N/A	-	1 unit	19.763.100,00		210.000,00	Pemeliharaan dan perluasan area kantor
7	01	01	2.09.10	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	n/a	16 unit	8.530.000,00	7 unit	935.000	16 unit	11.820.000,00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	02		Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	85,20	n/a	87	8.574.850,00		1.662.500	87	7.374.850,00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	02	2.02	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	n/a	100%	8.574.850,00	100%	1.662.500	100%	7.374.850,00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap

7	01	02	2.02.03	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan	n/a	12 laporan	8.574.850,00	6 Laporan	1.662.500	12 laporan	7.374.850,00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	05		Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	n/a	100%	60.025.000,00		10.730.000	100%	73.475.000,00	-	25.000,00	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
					2. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	n/a	100%		50%		100%		-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	05	2.01	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	n/a	1 laporan	18.025.000,00		10.730.000	1 laporan	25.475.000,00	-	25.000,00	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
					2. Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	n/a	4 dokumen	42.000.000,00	4 dokumen		4 dokumen	42.000.000,00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	05	2.01.03	Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	n/a	100 orang	18.025.000,00	1 Kegiatan	230.000	100 orang	25.475.000,00	-	25.000,00	Target Kinerja dan Anggaran Tetap

7	01	05	2.01.08	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	n/a	4 dokumen	42.000.000,00	4 laporan	10.500.000	4 dokumen	48.000.000,00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	04		Program: Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100%	n/a	100%	20.080.000,00	50%	6.061.300	100%	19.505.000,00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	04	2.02	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	n/a	12 kegiatan	20.080.000,00	6 kegiatan	6.061.300	12 kegiatan	19.505.000,00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	04	2.02.01	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	n/a	12 laporan	20.080.000,00	6 Laporan	6.061.300	12 laporan	19.505.000,00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	06		Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa	100%	n/a	100%	8.025.000,00	100%	966.500	100%	7.425.000,00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap

					Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	100%	n/a	100%		50 %		100 %		-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	06	2.01	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	22 dokumen	n/a	22 dokumen	8.025.000,00	11 dokumen	966.500	22 dokumen	7.425.000,00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	06	2.01.03	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 dokumen	n/a	22 dokumen	8.025.000,00	13 dokumen	966.500	26 dokumen	7.425.000,00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	03		Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	n/a	100%	42.612.500,00	50 %	16.245.000	100 %	51.125.000,00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
					2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	22 lembaga	n/a	22 lembaga		22 lembaga		22 lembaga		-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap

7	01	03	2.01	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	22 lembaga	n/a	22 lembag a	25.375.0 00,00	22 lem bag a	15.245.0 00	22 lem bag a	30.687.500 ,00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap
7	01	03	2.01.03	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	n/a	4 laporan	17.237.5 00,00	2 lapo ran	1.000.00 0	4 lapo ran	20.437.500 ,00	-	-	Target Kinerja dan Anggaran Tetap

BAB IV PENUTUP

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA SKPD) Kecamatan Jogoroto Tahun anggaran 2024, maka diharapkan dapat terwujud suatu pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan kinerja aparatur serta Pembangunan, khususnya pada kantor Kecamatan Jogoroto dalam kurun waktu tahun 2024 khususnya pada tribulan III dan IV.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak semata-mata dititik beratkan pada perencanaan yang strategis saja, namun perlu didukung dengan peningkatan kinerja aparatur. Untuk mewujudkan itu, maka semua komponen dapat memberikan kontribusi secara optimal dalam pembangunan Kecamatan Jogoroto melalui Pemberdayaan Masyarakat dan pelayanan prima sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya perlu pula ditingkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta Desa dalam wilayah kecamatan Jogoroto, sehingga makin memantapkan apa yang telah dicapai sekaligus dapat memenuhi harapan masyarakat.

Demikian Perubahan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Jogoroto Tahun anggaran 2024 yang dapat kami sampaikan, dengan harapan terwujudlah suatu kegiatan pembangunan yang berkesinambungan. Selanjutnya masukan-masukan, koreksi, kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan lebih lanjut.

Jogoroto, Juli 2024
CAMAT JOGOROTO

NUNIK HIDAYATI, ST
Pembina Tk I
NIP. 196908141997032003